

**MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN: STUDI TIM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA
TAMANMARTANI, SLEMAN, YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Oleh:

Dyah Retno Utami

NIM 15230029

Pembimbing:

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si

NIP 198104282003121003

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: B-1059/un.02/DD/PP.05.3/05/2019

Tugas Akhir dengan Judul: **Model Pengentasan Kemiskinan : Studi Tim
Penanggulangan Kemiskinan Di Desa
Tamanmartani, Sleman, Yogyakarta**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dyah Retno Utami
Nomor Induk Mahasiswa : 15230029
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang**


Dr. Pajar Hartono Indra Javan, S.Sos., M.Si.
NIP. 19810128 198012 1 003

Penguji I

Penguji II


Drs. Mohammad Abur Subud, M.Pd.
NIP. 19610410 199001 1 001


Savanto, S.Sos., M.Si.
NIP. 19660531 198801 1 001

Yogyakarta, 07 Mei 2019

**UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi**


Dr. Nurjanah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230

E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dyah Retno Utami

NIM : 15230029

Judul Skripsi : Model Pengentasan Kemiskinan : Studi Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Tamanmartani, Sleman, Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kembali ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb

Yogyakarta, 06 Mei 2019

Mengetahui,
Pembimbing,

Ketua Prodi PMI,


Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si
NIP. 198104282003121003


Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si
NIP. 198104282003121003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Retno Utami

NIM : 15230029

Program studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "*Model Pengentasan Kemiskinan : Studi Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Tamanmartani, Sleman, Yogyakarta*" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Mei 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KARTASURA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan


Dyah Retno Utami



Halaman Persembahan

*Teruntuk diriku sendiri Dyah Retno Utami
yang telah berusaha menyelesaikan tugas akhir ini
dan teruntuk orang tua tercinta.*



MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Thabrani dan Daruquthni)¹



¹ Hadist Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu'jam al-Ausath, juz VII, hal.58, dari jabir bin Abdullah r.a dalam kitab As-Silsilah Ash-Shalihilah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang tak pernah henti melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebaik-baiknya manusia untuk dijadikan teladan dan kemuliaanya yang akan senantiasa menghiasi sejarah peradaban.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini ada banyak bantuan, dorongan serta bimbingan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjanah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, sekaligus pembimbing skripsi yang di sela-sela kesibukannya telah bersedia membimbing, mengarahkan dan menesehati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua TPK Tamanmartani, Ibu Maemunah yang ramah menerima penulis setiap datang penelitian dan semua narasumber yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi untuk kebutuhan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman, dan keterampilan kepada penulis selama kuliah di Prodi PMI. Semoga apa yang telah diberikan dapat memberikan manfaat.
6. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan banyak dukungan baik moril maupun materiil dalam kehidupan penulis. “Terima kasih atas segala pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan untuk anakmu ini”
7. Kedua adik perempuanku Dian Ariyani dan Dina Astri Pratiwi yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Pak Aziz Amrullah selaku Manager BPUN Kabupaten Ngawi yang memotivasi dan menularkan semangat sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan sampai saat ini.
9. Keluarga FOPPERHAM yang telah menjadi tempat belajar dan berproses sekaligus menemukan keluarga baru di Jogja. Pak Romadlon dan Mbak Astri terima kasih atas segala dukungan yang diberikan selama ini. Bagiku kalian adalah orang tua kedua yang banyak mengajarku banyak hal selama ini. Partner-partner muda Mas Hendrik, Muntiyati, Mas Sapar, Susi, Siti dan Endah. Terima kasih, bersama kalian aku mengarungi dunia lapangan yang dinamis tapi manis. Semoga ikatan kekeluargaan ini tidak pernah pudar.
10. Keluarga Kiprah Perempuan: Mbak pipit dan budhe-budhe yang menginspirasi, semoga senantiasa diberi kesehatan.

11. Keluarga besar LPM Rhetor tempatku mengenal organisasi: Faris, Fahri, Javang, Ika, Anom, Riska, Wulan dan senior-senior yang telah memberikan berbagai pengalaman diskusi, liputan, wawancara dan banyak kenangan lainnya, terima kasih.
12. Keluarga PMI 2015. Teman belajar dan menuntut ilmu selama di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Semoga tali silaturahmi tetap terjaga dan kesuksesan menyertai kalian semua.
13. Teman-teman PPM TPS 3R Brama Muda Dusun Dayakan : Rizki, Dasilah, Baiti, Munti, Yazid, Ilham, dan Masrudin. Terimakasih sudah menjadi partner kerja yang baik selama satu tahun PPM di Dusun Dayakan.
14. Teman-teman KKN Sangon 1 : Ni'am, Nadya, Mas Ainur, Mas Syarif, Endah, Izah, Nur, Ayu dan Zhukruf. Terima kasih sudah menjadi teman berbagi selama KKN. Ada banyak pengalaman yang tak akan terlupakan.
15. Teman-teman BPUN Ngawi di Jogja : Wahyudi, Ayya, Fahmi, Mbak Ira, Mas Max. Terimakasih sudah menjadi teman berbagi dan pengisi waktu luang (via Minimus) selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
16. Teman-teman kos Pak Roto : Diah, Titis, Mbak Adah, Mbah Fiki, Citra, Aisyah yang telah memberi makna hidup dalam kebersamaan dan berdampingan.

17. Segenap pihak yang telah membantu penulis dari penyusunan proposal, penelitian hingga penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan seluruhnya.

Penulis sadar karya ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih wawasan keilmuan pemberdayaan masyarakat.

Yogyakarta, 06 Mei 2019

Penyusun

Dyah Retno Utami
15230029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kemiskinan telah menjadi permasalahan global, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai macam cara telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sampai akhirnya, melalui kebijakan ditingkat pusat dan daerah lahirlah Tim Penanggulangan Kemiskinan yang ditunjuk khusus untuk mengatasi masalah kemiskinan di tingkat wilayah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kemiskinan yang ada di Desa Tamanmartani dan mendiskripsikan model pengentasan kemiskinan yang dilakukan TPK Tamanmartani atas masalah kemiskinan yang terjadi. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menjawab tujuan penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada Pihak Desa Tamanmartani, pihak TPK Tamanmartani, mitra TPK Tamanmartani dan penerima manfaat dari kegiatan yang telah diupayakan TPK Tamanmartani. Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang ada di Desa Tamanmartani diakibatkan oleh tiga faktor, yakni faktor pendidikan, faktor pekerjaan dan faktor usia. Model pengentasan yang dilakukan melalui dua pola yakni pengentasan secara internal dan eksternal. Pengentasan secara internal dilakukan oleh pihak TPK Tamanmartani dan masyarakat sekitar tanpa melibatkan pihak luar. Sedangkan penyelesaian eksternal dilakukan TPK Tamanmartani dengan menggandeng pihak luar untuk bisa menjadi penghubung/mengakseskan kebutuhan yang diperlukan masyarakat miskin. Selama ini pihak TPK Tamanmartani telah berhasil mengakses ke jaringan pemerintah maupun pihak swasta. Melalui analisis yang dilakukan, pola kerja yang diterapkan TPK sudah cukup baik, akan tetapi jumlah angka kemiskinan belum turun secara signifikan. Lantaran bantuan yang diberikan hanya cukup untuk membantu kehidupan sehari-hari.

Kata kunci : *Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Tim Penanggulangan Kemiskinan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIS	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Kerangka Teori.....	13
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Pembahasan	32
 BAB II GAMBARAN UMUM DESA TAMANMARTANI.....	 34
A. Profil Desa Tamanmartani	34
1. Letak Geografis	34
2. Struktur Penduduk.....	36
3. Sarana dan Prasarana.....	36
4. Kondisi Sosial	39

5. Kondisi Ekonomi	42
6. Kondisi Kemiskinan.....	43
7. Struktur Pemerintahan dan Visi Misi Desa Tamanmartani.....	44
 B. Profil TPK Tamanmartani.....	45
1. Sejarah Terbentuknya TPK Tamanmartani.....	45
2. Struktur Kepengurusan TPK Tamanmartani.....	48
3. Program Kerja TPK Tamanmartani	49
4. Operasioanal TPK Tamanmartani.....	50
5. Indikator Kemiskinan TPK Tamanmartani.....	54
 BAB III PEMBAHASAN	60
A. Karakteristik Kemiskinan Desa Tamanmartani Dilihat Dari Penyebab	60
1. Faktor Pendidikan	61
2. Faktor Pekerjaan.....	63
3. Faktor Usia	66
B. Model Pengentasan Kemiskinan.....	69
1. Macam-macam Model Pengentasan Kemiskinan TPK Tamanmartani.....	69
a. Model Pengentasan Secara Internal	70
b. Model Pengentasan Secara Ekternal	72
2. Hasil Pengentasan Kemiskinan TPK Tamanmartani	88
 BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	101
 DAFTAR PUSTAKA	103
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Dusun dan Jumlah RT/RW di Desa Tamanmartani.....	33
Tabel 2 Pertumbuhan Penduduk Desa Tamanmartani	34
Tabel 3 Sarana dan Prasarana Desa Tamanmartani	35
Tabel 4 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	38
Tabel 5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tamanmartani.....	40
Tabel 6 Susunan Pemerintahan Desa Tamanmartani.....	42
Tanel 7 Struktur Kepengurusan TPK Tamanmartani.....	46



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil Kemiskinan di Indonesia.....	4
Gambar 2 Strategi Makro Pengentasan Kemiskinan	22
Gambar 3 Kantor Desa Tamanmartani	32
Gambar 4 Kondisi Jalan Kabupaten yang ada di Desa Tamanmartani	36
Gambar 5 Kondisi Jalan Di Dusun Ringinsari	36
Gambar 6 Kondisi Jalan Di Dusun Tulung	37
Gambar 7 Kantor TPK Tamanmartani	43
Gambar 8 Gardu LINMAS dan Kantor Baru yang Dibangun Menggunakan Dana Desa	49
Gambar 9 Formulir Data Kemiskinan TPK Tamanmartani	53
Gambar 10 Bantuan Jamban Untuk Warga Miskin	74
Gambar 11 Bantuan Rehap Rumah Untuk Warga Miskin	76
Gambar 12 Pemberian Modal Stimulan Untuk Budidaya Burung	77
Gambar 13 Pemberian Modal Stimulan Sepeda dan Angkringan	78
Gambar 14 Penyerahan Bantuan JSLU Oleh TPK Tamanmartani	79
Gambar 15 Kondisi Bantuan Sumur Warga Miskin	85

DAFTAR GRAFIS

Grafis 1 Persentase warga miskin menurut Pendidikan.....	60
Grafis 2 Persentase warga miskin menurut pekerjaan	62
Grafis 3 Persentase warga miskin menurut usia	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahan pengertian dalam memahami maksud judul skripsi : *Model Pengentasan Kemiskinan : Studi Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tamanmartani, Sleman, Yogyakarta*, maka dipandang perlu adanya penegasan mengenai beberapa istilah-istilah dalam judul skripsi ini.

1. Model Pengentasan Kemiskinan

Pengertian model menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah pola atau bentuk dari sesuatu yang akan dibuat. Sedangkan Pengentasan Kemiskinan berasal dari dua kata pengentasan dan kemiskinan. Menurut KBBI pengentasan memiliki arti mengakat (dari suatu tempat ke tempat lain), sedangkan kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Berdasarkan hal tersebut, maka yang disebut model pengentasan kemiskinan adalah suatu pola yang akan digunakan untuk mengangkat masyarakat agar keluar dari keadaan serba kekurangan menuju ke keadaan yang lebih baik.

2. Tim Penanggulangan Kemiskinan

Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) merupakan lembaga di bawah naungan desa yang bergerak untuk mengkoordinir program-

program penanggulangan kemiskinan yang ada di desa. TPK resmi berdiri pada tahun 2013 atas instruksi dari kabupaten. Sedangkan struktur nasionalnya TNP2K (Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) diketuai Wakil Presiden, kemudian turun ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan terakhir ke tingkat padukuhan².

3. Desa Tamanmartani, Sleman, Yogyakarta

Desa Tamanmartani, Sleman adalah nama desa dimana penelitian ini dilakukan. Secara administratif, Desa Tamanmartani termasuk dalam wilayah Kecamatan Kalasan dengan luas wilayah mencapai 7,30 km². Desa Tamanmartani merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan bersebelahan dengan Kecamatan Prambanan³. Lokasi ini diambil karena di Desa Tamanmartani telah terbentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan yang aktif dan berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin setempat.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, maka maksud dari judul skripsi : *Model Pengentasan Kemiskinan : Studi Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tamanmartani, Sleman, Yogyakarta*, adalah penelitian terhadap pola yang dilakukan Tim Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka melakukan pengentasan kemiskinan di Desa Tamanmartani, Sleman, Yogyakarta.

² Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Tamanmartani.

³ Kecamatan Kalasan Dalam Angka 2018.

B. Latar Belakang Masalah

Ketidaksetaraan dan kemiskinan merupakan masalah global yang serius untuk ditangani. Menyoroti pentingnya hal tersebut, Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 telah menyepakati keputusan bersama mengenai pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Dari pertemuan itu, negara deklarator (termasuk Indonesia) setuju untuk menjalankan kemitraan global baru guna mengurangi kemiskinan dalam kurun waktu 15 tahun⁴. Sepanjang batas waktu yang telah ditentukan, ternyata tujuan dan target MDGs masih belum optimal sehingga perlu adanya penyempurnaan yang kemudian dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Di Indonesia, realisasi pengentasan kemiskinan ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang kemudian menyiapkan berbagai program dan tindakan terkait upaya pencapaian pembangunan⁵. Selain itu pemerintah Indonesia membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang diperkuat dengan landasan yuridis⁶ yang relevan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan

⁴ Budi Sulistyio (ed), *MDGs Sebentar Lagi Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia?*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. Xiii.

⁵ Budi, *MDGs Sebentar Lagi*, hlm. Xvi.

⁶ UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ; Perpres No 7/2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Bab XVI tentang Penanggulangan Kemiskinan ; Peraturan Presiden No. 54/2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

secara langsung⁷. Beberapa program turunan dari kebijakan tersebut ialah PNPM Mandiri, PKH, kredit usaha mikro, pengadaan listrik pedesaan dan sertifikasi tanah⁸.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun dalam pengurangi angka kemiskinan menunjukkan perubahan meskipun belum signifikan pada tahun 2011-2017. Dalam kurun waktu 2011-2017, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 13,3 persen menjadi 10,64 persen, hingga jumlah penduduk miskin per 2017 sebesar 27,77 juta jiwa.

Gambar.1
Profil Kemiskinan di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat, waktu yang dibutuhkan dalam mengurangi angka kemiskinan ini tergolong lambat, meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana

⁷Ayu Hardiana dkk, “Perundang-undangan Sosial : Pengentasan Kemiskinan dan Prakteknya”, Bingkai Kebersamaan, <https://anfieldvillage.wordpress.com/2015/05/31/perundang-undangan-sosial-pengentasan-kemiskinan-dan-prakteknya/>, diakses tanggal 17 Mei 2018.

⁸ Camila Zahra, “Program Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran”, *Jokbagin.com*, <http://www.jokbagin.com/2012/08/program-pemerintah-dalam-mengatasi.html>, diakses tanggal 24 Mei 2018.

sebesar Rp. 394,76 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)⁹. Lambatnya penurunan kemiskinan ini bisa disebabkan beberapa hal, diantaranya program penanggulangan kemiskinan yang terfragmentasi dan tidak berkelanjutan, implementasi program, seperti keterlambatan penyaluran, kualitas pendampingan, permasalahan data sasaran, dan implikasi pemekaran wilayah yang mempersulit koordinasi¹⁰.

Pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu menjangkau berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini juga memiliki angka kemiskinan yang cenderung mengalami penurunan meskipun belum cukup signifikan. Dilansir dari Badan Pusat Statistik D.I.Yogyakarta pada September 2016 terdapat 494,94 ribu jiwa (13,10%) menjadi 488,53 ribu jiwa (13,02%) itu artinya terjadi penurunan sebanyak 6,41 ribu jiwa (0,08%)¹¹.

Ditengah angka kemiskinan yang tidak turun secara signifikan, langkah taktis yang kemudian dilakukan pemerintah ialah membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. TPK bergerak di bawah naungan desa untuk mengkoordinir program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di desa¹². Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik

⁹Asry Ani Sucianingsih, "Kucuran Dana Desa Membantu Mengurangi Angka Kemiskinan", Kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/kucuran-dana-desa-membantu-mengurangi-angka-kemiskinan>, diakses tanggal 23 Oktober 2018.

¹⁰Aha, "Kemiskinan Masih Pelik", Koran Kompas (April:2018), hlm. 17.

¹¹Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta, <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2017/07/17/500/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta-maret-2017.html>, diakses tanggal 17 Mei 2018.

¹²<https://bappeda1.slemankab.go.id/evaluasi-kelembagaan-tpk-tim-penanggulangan-kemiskinan-di-kabupaten-sleman.slm>, diakses tanggal 17 Mei 2018.

Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern. Pemerintah bertanggung jawab membentuk kelembagaan panitia bersama atau sekretariat bersama untuk pembangunan berkelanjutan di tanah air¹³.

Selaras dengan adanya kebijakan di atas, tentunya telah banyak TPK yang terbentuk dari berbagai daerah di Indonesia. Di Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman tercatat ada 86 TPK baik yang aktif maupun tidak. Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dalam Bab III pasal 9 mengenai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perda tersebut menyebutkan bahwa, upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Salah satu desa yang telah menerapkan Perda No. 1 Tahun 2017 dan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) adalah Desa Tamanmartani. Desa Tamanmartani terletak di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Atas intruksi ditingkat pusat, TPK Tamanmartani terbentuk pada tahun 2013. Dari empat desa yang ada di Kecamatan Kalasan, hanya TPK Desa Tamanmartani yang aktif menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengkoordinir program-program penanggulangan kemiskinan. Sejauh ini, dalam kiprahnya mengatasi masalah kemiskinan

¹³Amelia Nggraini, "Indonesia dan SDGs", Media Indonesia, <http://mediaindonesia.com/read/detail/124290-indonesia-dan-sdgs>, diakses tanggal 30 Mei 2018.

ditingkat desa, TPK Tamanmartani telah mengurangi warga miskin yang berjumlah 1.862 KK menjadi 1.443 KK atau 22,5 persen¹⁴.

TPK Tamanmartani tentu tidak sendiri dalam mengatasi berbagai masalah kemiskinan yang ada. Selama ini pihaknya berhasil menggandeng partner dari berbagai instansi, baik swasta maupun pemerintah. Atas kerjanya dalam rangka mengatasi kemiskinan, TPK Tamanmartani diapresiasi dengan memperoleh penghargaan pada acara Tim Penanggulangan Kemiskinan Award tahun 2017. Kegiatan ini sebagai sarana untuk menemukan pola kerja yang dapat dijadikan contoh dan inspirasi dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sleman¹⁵.

Dari data dan informasi di atas menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat dari tingkat bawah (desa) sekalipun, yang dalam hal ini diperankan oleh TPK Tamanmartani. Maka dari itu penulis tertarik melakukan riset untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dilakukan TPK Tamanmartani dalam rangka pengentasan kemiskinan. Oleh karenanya, penulis akan menuangkan dalam penelitian yang berjudul “Model Pengentasan Kemiskinan : Studi Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tamanmartani, Sleman, Yogyakarta”.

¹⁴ Surat Keputusan Bupati Sleman Tahun 2015-2018 tentang Keluarga Miskin Desa Tamanmartani.

¹⁵ Harian Merapi, *Turun Kurang dari 1 Persen TPK Award inspirasi penanggulangan kemiskinan*, <https://www.harianmerapi.com/news/2017/12/19/3822/turun-kurang-dari-1-persen-tpk-award-inspirasi-penanggulangan-kemiskinan>, diakses tanggal 27 September 2018.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik kemiskinan yang ada di Desa Tamanmartani?
2. Bagaimana model pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa Tamanmartani sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan sebesar 22,5%?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan karakteristik kemiskinan yang ada di Desa Tamanmartani.
2. Mendiskripsikan model pengentasan kemiskinan yang dilakukan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa Tamanmartani yang telah mengurangi angka kemiskinan sebesar 22,5%.

E. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan dalam penelitian sosial pada pengembangan ilmu sosial baik secara umum maupun secara khusus bagi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis yaitu penelitian yang berkaitan dengan Model Pengentasan Kemiskinan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumbangsih terhadap dunia perpustakaan, khususnya dalam tema Model Pengentasan Kemiskinan
- b. Penulis berharap penyusunan ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi Tim Penanggulangan Kemiskinan di tingkat desa lainnya, dalam melakukan pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat miskin sehingga masyarakat dapat keluar dari zona kemiskinan.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian Pustaka dimaksudkan untuk membandingkan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Penulis akan menelusuri apakah penelitian yang sebelumnya mempunyai kesamaan atau perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian kali ini, ada beberapa penelitian yang relevan dengan model pengentasan kemiskinan:

Pertama, penelitian milik Luluk Farida yang berjudul “*Upaya Pemberdayaan Ekonomi yang Dilakukan Oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) di Desa Murtigading, Kec. Sanden, Kab. Bnatul, Yogyakarta*” penelitian ini membahas tentang upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan di tingkat dusun. Program yang diberikan kepada masyarakat berupa pembekalan dan keterampilan dengan tujuan agar bisa produktif. Tim Penanggulangan

Kemiskinan sendiri hanya sebatas mendampingi pelaksanaan program pelatihan tersebut¹⁶. Selanjutnya dari program yang diberikan harapannya mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan Edi Suharto, dimana tujuan dari pemberdayaan itu sendiri ialah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Kedua, penelitian milik Rachma Suci Arrianti yang berjudul *“Penanggulangan Kemiskinan di Dusun Ceme, Srigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta”* penelitian ini membahas tentang upaya penanggulangan kemiskinan di Dusun Ceme. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap hal-hal yang melatarbelakangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat dusun tersebut. Menggunakan teori Emil Salim yang membagi penyebab kemiskinan ada dua yakni kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut, terdapat beberapa program perbaikan perkampungan seperti perbaikan jalan, latihan keterampilan berupa kursus, dan pengembangan usaha masyarakat¹⁷.

Ketiga, penelitian milik Muhammad Nafiudin yang berjudul *“Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang”* penelitian ini membahas mengenai implementasi Dana Desa tergolong

¹⁶Luluk Farida, *Upaya Pemberdayaan Ekonomi yang Dilakukan Oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) di Desa Mutigading, Kec. Sanden, Kab. Bantul, Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta : Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 82.

¹⁷ Rachma Suci Arrianti, *Penanggulangan Kemiskinan di Dusun Ceme, Srigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 46.

baik dan sudah sesuai dengan pedoman Buku Saku Dana Desa. Selain itu implementasi dana desa juga digunakan untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan banyak teori kemiskinan, seperti ketergantungan-dominasi, teori kemiskinan menurut islam, pengentasan kemiskinan melalui tabungan dan investasi, teori David Mclelland dorongan motivasi dan teori manusia modern (Inkeles dan David H.Smith). Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan ialah memperbaiki saluran irigasi dengan baik sehingga bisa meningkatkan hasil panen, bertambahnya pengetahuan dan kedasaran masyarakat¹⁸.

Keempat, penelitian milik Yani Riyani dkk yang berjudul “*Analisis Pengaruh Program Pengentasan Kemiskinan dalam Upaya Menghasilkan Suatu Model Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan (Studi Eksperimen pada Dusun Wonodadi, Desa Sei. Bulan Kabupaten Bulu Raya Provinsi Kalimantan Barat*” penelitian ini membahas tentang model yang tepat dan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan dengan cara menganalisis pengaruh program pengentasan kemiskinan yang berupa pemberian imbalan hak atas lahan, bantuan tunai langsung, dan dusun binaan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Harry Hikmat, dimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yaitu pemberdayaan, kemitraan

¹⁸ Muhammad Nafiudin, “*Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang*”, Skripsi (Yogyakarta, Program Studi Penegembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 25.

dan partisipasi. Hasilnya, model pemberdayaan dan partisipasi dinilai cocok dengan struktur masyarakat disana. Dimana pemberian imbalan hak atas tanah dan desa binaan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹⁹.

Kelima, penelitian milik Trimo Yulianto yang berjudul “*Fenomena Program-program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat)*” penelitian ini membahas tentang model pembangunan pemenuhan kebutuhan dasar. Karena keterbatasan anggaran, penentuan sasaran program dihadapkan pada pilihan antara kualitas program dengan kuantitas. Bidang kesehatan dan pendidikan yang mendapatkan prioritas utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan²⁰. Program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan menggunakan pendekatan perencanaan top-down. Dimana pelaksanaan program sesuai pendelegasian wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan oleh penulis, penelitian ini mengandung unsur kesamaan dengan penelitian sebelumnya yakni membahas mengenai pengentasan kemiskinan. Namun, dari beberapa pustaka di atas penulis belum menemui literatur yang membahas tentang

¹⁹ Yani Riyani dkk, “*Analisis Pengaruh Program Pengentasan Kemiskinan dalam Upaya Menghasilkan Suatu Model Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan (Studi Eksperimen pada Dusun Wonodadi, Desa Sei. Bulan Kabupaten Bulu Raya Provinsi Kalimantan Barat)*”, Jurnal Aplikasi Manajemen, vol. 8: 2 (Mei, 2010), hlm. 319.

²⁰ Trimo Yulianto, *Fenomena Program-program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat)*, Tesis (Semarang: Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 42.

pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan di tingkat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya berdasarkan objek dan subjek penelitian. Hal ini semakin mempertegas penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

G. Kerangka Teori

1. Kemiskinan

Menurut Levintan kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak²¹. Lain lagi menurut John Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial, meliputi modal produktif atas aset, sumber keuangan, organisasi sosial dan politik, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan dan informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan²². Sedangkan arti kemiskinan manusia secara umum adalah kurangnya kemampuan esensial manusia terutama dalam hal memenuhi kebutuhan konsumsi minimum²³.

²¹ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: In-Trans Publishing, 2013), hlm. 1.

²² *Ibid.*, hlm. 2-3.

²³ Jullinar An-naf, "Pengentasan Kemiskinan Sebagai Sasaran Strategis dalam Pembangunan Di Indonesia", *Jurnal Madani Edisi I*, (Mei, 2011), hlm. 64-65.

Klasifikasi kemiskinan menurut Nasikun dalam *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan* dibedakan menjadi empat bentuk yakni²⁴:

a) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut diindikasikan apabila pendapatan yang diperoleh berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Misalnya kaum dasa wisma, orang-orang yang tinggal dipinggiran kota.

b) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah suatu kondisi kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Dapat dikatakan hidup berada di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Contohnya banyaknya pengangguran karena lapangan pekerjaan sedikit, perbedaan pembangunan antara Indonesia Wilayah Barat dan Timur, Pembangunan di desa dan di kota.

²⁴ Nasikun, *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001), hlm. 19.

c) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural yakni lebih mengacu pada persoalan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seakan tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan seperti malas, pemborosan, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

d) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural ialah situasi kemiskinan yang disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, dan malah menyebabkan suburnya kemiskinan. Misalnya masyarakat Indonesia Timur yang hidup di tengah hutan sulit untuk mengakses pendidikan dan mengembangkan perekonomian karena akses jalan yang tidak mendukung untuk keluar wilayah, masyarakat Papua yang tidak mendapat manfaat dari PT Freeport.

2. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan merupakan konsep pendekatan yang digunakan untuk mengukur angka kemiskinan. Berikut ini penulis mengambil salah satu lembaga yang merumuskan indikator penentuan kemiskinan yakni Badan Pusat Statistik (BPS)²⁵. BPS mengartikan

²⁵ Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 12.

kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun nonpangan. BPS menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Berdasarkan hal itu, indikator yang digunakan adalah *head count index*, yakni jumlah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan diperoleh dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan nonpangan. Kebutuhan minimum pangan ditetapkan 2.100 kkal/kapita/hari. kebutuhan nonpangan dilihat dari pengeluaran untuk perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Selain daripada perhitungan di atas, BPS juga menyertakan hasil analisis tentang karakteristik rumah tangga miskin. Di dalamnya tergambar kondisi rumah tangga miskin berdasarkan sosial demografi, pendidikan, kesehatan, sumber penghasilan, rasio ketergantungan, ketenagakerjaan, kondisi perumahan dll. Karakteristik yang dianggap BPS memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan diantaranya adalah jumlah anggota rumah tangga, kepala rumah tangga yang berstatus janda, pendidikan kepala rumah tangga yang rendah atau buta huruf, perbedaan geografis antara kota dan desa, lapangan usaha dan status pekerjaan, rumah tangga tanpa akses terhadap air bersih, fasilitas buang air besar, pemanfaatan listrik dll.

3. Model Pengentasan Kemiskinan

Kata model dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah pola, bentuk, contoh, dan acuan dari sesuatu yang akan dibuat²⁶. Jadi model yang dimaksud dalam pembahasan mengenai pengentasan kemiskinan disini berarti suatu pola yang dibentuk untuk pengentasan kemiskinan. Dalam sub bab ini akan ada dua ulasan yang berkaitan dengan model pengentasan kemiskinan.

a) Model Pengentasan Kemiskinan Menurut Undang-Undang dan Klasifikasi Umur

Kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan negara ini. Sifatnya yang multidimensi tentu tidak bisa diselesaikan dalam sekali dayung, sehingga penanganan pun harus benar-benar sesuai dengan kondisi kemiskinan yang di alami si miskin agar dapat keluar dari lingkaran setan dan hidup sejahtera. Banyaknya permasalahan sosial sekarang ini menunjukkan bahwa banyak warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum mendapatkan pelayanan sosial dari negara.

Untuk itu UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial disahkan untuk menjamin tentang hal tersebut. Materi pokok dalam undang-undang ini antara lain tentang pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan

²⁶ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <http://www.kbbi.web.id/model>, diakses tanggal 24 April 2019.

profesional serta perlindungan sosial²⁷. Hal ini telah di rinci dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pasal 6, yang mengatur terselenggaranya kesejahteraan sosial, yakni meliputi: **Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan perlindungan sosial.**

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Gunawan Sumodiningrat menyatakan, agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau penanggulangan kemiskinan itu tepat dan efektif, ada sasaran dan fokus yang harus ditentukan. Gunawan Sumodiningrat mengklasifikannya berdasarkan kelompok umur²⁸:

- 1) Usia lebih dari 55 tahun, yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif (lansia miskin). Untuk kelompok ini bentuk penanggulangan kemiskinan dilaksanakan bersifat pelayanan sosial (santunan, jaminan sosial, dll).
- 2) Usia antara 15-55 tahun, yaitu usia sedang tidak produktif (miskin, pengangguran). Pada kelompok ini penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja/usaha, peningkatan kapasitas/pendapatan, investasi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sosial secara mandiri dan berkelanjutan.

²⁷Solider, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, <https://www.solider.id/2013/07/26/undang-undang-nomor-11-tahun-2009-tentang-kesejahteraan-sosial>, diakses pada 26 Januari 2019.

²⁸Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menaggualangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 49-50.

- 3) Usia di bawah 15 tahun, yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia sekolah, belum bisa bekerja). Dimana perlu adanya penyiapan sosial melalui pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan).

b) Model Pengentasan Kemiskinan dengan Strategi Makro

Kemal Aziz Stamboel dalam bukunya *Panggilan Keberpihakan*²⁹ menguraikan sebuah model pengentasan kemiskinan. Ia mengungkapkan bahwa setidaknya ada empat hambatan yang harus diselesaikan untuk dapat menjalankan pengentasan kemiskinan. Hambatan Struktural, Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM), Hambatan Institusi dan Hambatan Sosial budaya. Keempatnya ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan lainnya sehingga penyelesaian satu hambatan saja tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan jika hambatan yang lainnya tidak diselesaikan.

Strategi komprehensif dalam menyelesaikan kemiskinan harus sesuai dengan permasalahan yang timbul dari hambatan-hambatan diatas. Untuk itu, Kemal Aziz menggambarkan sebuah model pengentasan kemiskinan yang disebut sebagai Strategi Makro Pengentasan Kemiskinan³⁰. Model tersebut digambarkan sebagai berikut:

²⁹ Kemal Aziz Stamboel, *Panggilan Keberpihakan Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 35.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

Gambar.2
Strategi Makro Pengentasan Kemiskinan



Sumber : Kemal Aziz Stamboel dalam Panggilan Keberpihakan

Sebagaimana yang dapat dilihat, model tersebut mensyaratkan empat proses transformasi yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Keempat proses transformasi tersebut ialah transformasi struktural, transformasi sumber daya manusia (SDM), transformasi Institusi dan transformasi sosial budaya. Tujuan dari empat pilar transformasi tersebut adalah mengubah kondisi masyarakat yang miskin menjadi lebih sejahtera³¹.

Setidaknya ada empat indikator keberhasilan dari transformasi-transformasi tersebut, yakni:

1. Adanya kesetaraan dalam struktur ekonomi dan distribusi aset atau modal sehingga kesenjangan semakin berkurang.

³¹ *Ibid.*, hlm. 37.

2. Terjadi peningkatan kapabilitas masyarakat miskin yang bisa dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, kualitas pendidikan, kesehatan, fasilitas untuk bertahan hidup, jaminan layanan kesehatan dasar, partisipasi dalam proses politik dan pembuatan kebijakan dll.
3. Terwujudnya institusi yang baik sehingga berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan kredibel.
4. Terciptanya masyarakat yang memiliki budaya kerja baru untuk mendorong produktifitas dan optimalisasi modal sosial yang produktif dan kontributif dalam proses pembangunan.

Dari beberapa transformasi di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi, seperti faktor-faktor eksternal yang turut mempengaruhi keberhasilannya. Ada dua faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu stabilitas makro ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan. Kedua faktor ini menjadi prasyarat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa empat pilar transformasi berjalan baik. Keduanya juga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, karena stabilitas makro ekonomi menjadi penentu utama stabilitas politik-keamanan dan begitu pula sebaliknya³².

³² *Ibid.*, hlm. 38.

4. Konsep Islam mengenai pengentasan kemiskinan

Konsep pengentasan kemiskinan dalam islam tidak hanya menggantungkan diri pada konsep zakat saja. Dimana penerima zakat telah disebutkan dalam Al-quran bahwa ada delapan golongan yang diutamakan, salah satunya fakir miskin. Yusuf Qaradhawi merumuskan konsep pengentasan kemiskinan yang setidaknya mencakup tiga unsur pokok pada sebuah masyarakat berbangsa dan bernegara yakni pada individu, masyarakat dan negara. Dari semua unsur tersebut, ada enam sarana pengentasan kemiskinan versi Yusuf Qaradhawi, diantaranya³³:

a) Bekerja

Yang dimaksud dengan bekerja menurut Yusuf Qaradhawi adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang atau bersama orang lain untuk memproduksi barang atau memberikan jasa.

Bekerja merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur terpenting untuk memakmurkan bumi, yang merupakan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi.

b) Jaminan sanak famili

Jalan ini berpangkal kepada kesediaan masyarakat islam. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan fakir miskin, baik yang merupakan

³³ Yusuf Qaradhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 225..

sumbangan wajib maupun sumbangan yang dilakukan karena terpangggil mengharap pahala Allah. Dana-dana sumbangan itu bisa berbentuk: nafkah-nafkah yang diberikan kepada keluarga, hak-hak materiil dalam rangka menunaikan kewajiban bertetangga, zakat fitrah, sedekah-sedekah yang bersifat sunah, hak-hak materiil yang bersifat isidentil seperti denda karafah dan nadar, mencukupi orang yang kekurangan dll.

c) Zakat

Islam telah mengatur untuk mengutamakan pemberian zakat kepada delapan golongan. Secara tegas dan pasti islam telah menentukan hak mereka ke dalam harta orang berada yaitu berupa zakat. Jadi tujuan pertama zakat adalah menghapuskan kemiskinan. Menurut Yusuf Qaradhawi islam tidak menempatkan masalah zakat sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai salah satu tugas pemerintahan islam. Dalam hubungan ini islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk memungut dan membagikannya kepada yang berhak. Masalah ini tidak hanya di dasarkan pada kemurahan hati individu semata.

d) Jaminan Baitul Mal

Ketika perolehan zakat tidak dapat menutupi kebutuhan mereka yang membutuhkan, harta kekayaan pemerintahan muslim yang terhimpun dalam Baitu Mal dapat dipergunakan. Menurut

Yusuf Qaradhawi salah satu tugas negara adalah menciptakan keadilan di kalangan masyarakat, mengajak berbuat kebaikan, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukanlah suatu keadilan dan kebaikan bila kaum dhu'afa dan kaum miskin dibiarkan terlantar tanpa sandang pangan papan di tengah masyarakat yang hidup mewah, kelebihan harta dan mampu membantu mereka. Menurut pandangan islam negara harus menggunakan berbagai sarana untuk menghapus kemiskinan dan menjamin kehidupan yang layak bagi warganya. Dengan demikian terciptalah solidaritas islam dalam suatu masyarakat.

e) Kewajiban di Luar Zakat

Ada beberapa kewajiban selain zakat yang menurut Yusuf Qaradhawi merupakan sumber bantuan yang cukup signifikan bagi kaum fakir dan miskin dalam rangka menghapus kemiskinan. Beberapa diantaranya adalah hak tetangga, berkorban pada hari raya kurban, tebusan zhihar, tebusan bersenggama dengan istri pada siang hari di bulan ramadhan, fidyah kelompok yang tidak kuat menjalankan ibadah puasa, denda haji (denda yang dibayarkan seseorang ketika melanggar larangan ketika ihram sewaktu melaksanakan ibadah haji) dan hak orang miskin dari hasil pertanian ketika panen serta kewajiban melengkapi kebutuhan fakir miskin.

f) Sedekah Sukarela dan Kemurahan Hati Individu

Islam tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban dan ketentuan dikalangan pengikutnya. Ia pun berupaya menciptakan jiwa yang bersih, pemurah dan penyantun. Kepada umatnya ia mengajarkan kerelaan untuk memberi lebih dari permintaan, melaksanakan kewajiban lebih dari tuntunan, mengulurkan tangan tanpa diminta, dan berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

Menurut Yusuf Qaradhawi, disamping berbagai sarana mutlak yang sudah dijelaskan di atas, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi agar sejumlah sarana untuk menghapuskan kemiskinan, menjamin kaum fakir, menutupi kebutuhan pokok mereka, dan menjaga kehormatan sebagai manusia dapat berjalan dengan baik. Syarat yang keberhasilan tersebut ialah jika konsep yang telah disebutkan dipraktikkan dalam masyarakat islam yang berpegang teguh pada sistem islam secara utuh, baik dalam kehidupan ekonomi maupun politik. Sistem islam tentang kehidupan dan masyarakat bersifat integral dan saling melengkapi. Tidak boleh dipilah-pilah dengan cara mengambil sebagian daripadanya dan membuang sebagian lainnya. islam menolak pemilahan, bial dilakukan juga ia tidak akan bisa secara tuntas mengobati berbagai penyakit masyarakat.

5. Tim Penanggulangan Kemiskinan

TPK (Tim Penanggulangan Kemiskinan) merupakan lembaga di bawah naungan desa yang bergerak untuk mengkoordinir program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di desa. TPK resmi berdiri pada tahun 2013 atas instruksi dari kabupaten. Sedangkan struktur secara nasionalnya dibentuk TNP2K (Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang diketuai oleh Wakil Presiden, kemudian turun ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan terakhir ke tingkat padukuhan. Seluruh anggota di TPK merupakan relawan, yakni mereka yang peduli kepada sesama, agar warga miskin yang ada di desa dapat mandiri dan berdaya³⁴.

H. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga di bawah desa yakni Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Tamanmartani, tepatnya di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan memilih Tim Penanggulangan Kemiskinan Tamanmartani sebagai bahan penelitian ialah:

- a) Tim Penanggulangan Kemiskinan Tamanmartani menangani permasalahan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan rentan di Desa Tamanmartani.

³⁴<https://bappeda1.slemankab.go.id/evaluasi-kelembagaan-tpk-tim-penanggulangan-kemiskinan-di-kabupaten-sleman.slm>, diakses tanggal 17 Mei 2018.

- b) Tim Penanggulangan Kemiskinan Tamanmartani telah mampu melaksanakan program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat miskin dan rentan di Desa Tamanmartani.
- c) Tim Penanggulangan Kemiskinan Tamanmartani merupakan satu-satunya lembaga yang berhasil melakukan pengentasan kemiskinan dan memberi manfaat bagi masyarakat miskin dan rentan di Desa Tamanmartani.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh)³⁵. Alasan peneliti memilih menggunakan metode kualitatif karena metode kualitatif lebih deskriptif sehingga lebih mudah dalam memperoleh data-data untuk menjawab permasalahan dan menjawab pertanyaan yang diajukan.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian dalam studi ini ialah karakteristik kemiskinan dan model pengentasan kemiskinan yang dilakukan TPK Tamanmartani. Subjek penelitian adalah seseorang yang menjadi sumber informasi, yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang sedang diteliti³⁶. Untuk teknik pengambilan informan penulis menggunakan teknik

³⁵ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

³⁶ Y. Slamet, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 9.

purposive (kriteria). Teknik kriteria merupakan pengambilan sampel untuk meninjau kembali dan mengkaji informan yang cocok dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya³⁷.

Dalam menentukan informan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan yakni mereka yang terlibat penuh dalam kegiatan pengentasan kemiskinan TPK Tamanmartani, mereka yang cukup lama berpartisipasi dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian dan yang memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi seputar kajian penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil subjek penelitian sebagai berikut:

- a) Pemerintah Desa yaitu Kepala, Kasi Kesra, Kasi Pelayanan.
- b) Pengurus Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Tamanmartani yaitu ibu Maimunah selaku pengurus TPK Tamanmartani dan pihak TPK padukuhan.
- c) Penerima Manfaat dari Program TPK Tamanmartani yaitu sembilan warga miskin yang merasakan dampak pengentasan kemiskinan TPK Tamanmartani.
- d) Mitra kerja TPK Tamanmartani yaitu Dinas Sosial dan pihak-pihak swasta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan dan informasi yang

³⁷ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 90.

dapat dipercaya. Dalam proses pengumpulan data digunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat serta kegiatan yang nyata³⁸. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi.

- a) Observasi : Metode menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti³⁹. Tahapan dalam melakukan observasi yakni meliputi pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah itu mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian kemudian melakukan pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pencatatan.
- b) Wawancara : Percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, yakni untuk menggali informasi melalui pertanyaan yang diajukan pewawancara kepada orang yang diwawancarai dengan harapan dapat menjawab hal-hal yang diteliti⁴⁰. Wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur. Dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

³⁸ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 93.

³⁹ *Ibid.*, hlm.93-94.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 127.

- c) Dokumentasi : Merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik itu berupa dokumen, foto, transkrip, surat, notulen dan lain-lain sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan asumsi⁴¹.

5. Validitas Data

Validitas data digunakan untuk memeriksa keabsahan data berdasarkan kriteria tertentu agar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi atas data yang diperoleh⁴². Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data untuk keperluan pengecekan dan membandingkan terhadap sumber data satu dengan sumber data yang lain⁴³. Triangulasi metodologis dianggap cocok dengan penelitian ini, karena penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah dipadukan, seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan dan dokumentasi⁴⁴. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan
- c) Membandingkan hasil pengamatan dengan dokumen yang berkaitan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 158.

⁴² J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 324.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 330.

⁴⁴ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, hlm. 99.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipilih penulis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik interaktif, berupa pengumpulan data, mereduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi (disajikan dalam bentuk cerita) dan yang terakhir ialah penarikan kesimpulan.

- a) Pengumpulan data : Menghimpun semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai sumber informasi yang nantinya akan diolah dalam penelitian ini.
- b) Reduksi data : Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan pentransformasian data kasar yang diperoleh dari lapangan. Fungsi dari reduksi data ini ialah untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu. Dalam proses reduksi data, peneliti harus mencari data yang valid (memilih data yang benar-benar digunakan)⁴⁵.
- c) Penyajian data : Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data berupa teks naratif, matriks, grafik, tabel, jaringan maupun gambar-gambar. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca menarik kesimpulan. Selain itu penyajian data secara sistematis juga

⁴⁵ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 209.

dilakukan agar memudahkan untuk dipahami antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh⁴⁶.

- d) Penarikan kesimpulan : Dalam tahap ini, setelah memperoleh data dan memilihnya, peneliti lantas membuat rumusan. Selanjutnya, mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, mengelompokkan data yang telah terbentuk. Langkah yang terakhir yakni melaporkan hasil penelitian dan kemudian membandingkan dengan teori yang ada⁴⁷. Akhirnya akan dapat diketahui apakah penelitian yang dilakukan merupakan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada atautkah sama dengan temuan sebelumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi atas empat bab, masing-masing bab terbagi dalam berapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II memaparkan tentang gambaran umum Desa Tamanmartani. Bab ini berisi letak geografis, struktur penduduk, kondisi sosial dan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 209-210.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 210.

ekonomi, struktur pemerintahan Desa Tamanmartani, dan profil Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Tamanmartani.

Bab III berisi pembahasan yang meliputi karakteristik kemiskinan yang ada di Desa Tamanmaratni dan cara pengentasan kemiskinan yang dilakukan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tamanmartani.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai “Model Pengentasan Kemiskinan: Studi Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tamanmartani, Sleman, Yogyakarta”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik kemiskinan yang ada di Desa Tamanmartani

Kemiskinan yang terjadi di Desa Tamanmartani setidaknya memiliki karakteristik mengenai rendahnya pendidikan, pekerjaan dengan pendapatan rendah dan usia yang udah tidak produktif lagi. Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan yang ada, TPK Tamanmartani telah membuat indikator kemiskinan sebagai panduan dalam proses pendataan. Menurut teori Nasikun, kemiskinan yang ada di Desa Tamanmartani tergolong dalam kemiskinan absolut, yakni kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan dll ini terjadi pada faktor pendidikan dan usia. Selanjutnya kemiskinan yang disebabkan faktor pekerjaan masuk dalam golongan kemiskinan relatif karena pengaruh kebijakan yang membuat ketimpangan masyarakat.

2. Model pengentasan kemiskinan yang dilakukan TPK Tamanmartani

Model pengentasan kemiskinan yang dilakukan TPK Tamanmartani terbagi menjadi dua, yakni penyelesaian secara internal dan

penyelesaian secara eksternal. Dimana penyelesain secara internal dilakukan tanpa melibatkan pihak luar. Sedangkan penyelesaian secara eksternal perlu melibatkan pihak luar untuk dapat mengakses bantuan. Beberapa pihak luar tersebut terdiri dari pihak pemerintah dan pihak swasta diantaranya Dinas Sosial Sleman, Dinas Sosial DIY, Dinas Pekerjaan Umum Sleman, Kementrian Sosial, Restoran Grafika dan SPBU Kalasan. Bantuan yang telah berhasil diakses juga telah banyak dan bermacam-macam antarlain Bantuan WC/Jamban, bantuan Saluran Pembuangan Air dan Limbah (SPAL), Bantuan rehap rumah, Pemberdayaan stimulan, Jaminan Sosial Lanjut Usia(JSLU), Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) dan Sumurisasi. Dari banyaknya jaringan untuk mengakses bantuan, bantuan paling banyak dapat diakses melalui Dinas Pekerjaan Umum Sleman. Sedangkan untuk konsistensi bantuan didapat dari Dinas Sosial D.I.Y dan dari pihak swasta.

Kesimpulan yang perlu untuk digarispawahi ialah TPK Tamanmartani merupakan sebagai penghubung untuk dapat mengakses bantuan kepada warga miskin yang ada di Desa Tamanmartani. Maka dari itu program yang dilakukan juga tidak banyak mengingat keterbatasan dana yang ada.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, penulis ingin menyampaikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan Desa Tamanmanartani diantaranya:

1. Kepada pihak pemerintah desa s/d pusat untuk lebih memperhatikan keberlangsungan Tim Penanggulangan Kemiskinan Tamanmartani yang gigih dalam memperjuangkan masalah pengentasan kemiskinan di tingkat desa tetapi sangat kurang di suport dana yang maksimal. Padahal keberadaan TPK sangat potensial untuk mengurangi jumlah warga miskin.
2. Pemerintah dapat memberikan apresiasi atas kerja-kerja kemanusiaan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) dalam membantu sesama keluar dari zona kemiskinan.
3. Pengaktifan TPK di tingkat desa agar mau bekerja dan bergerak untuk mampu mengatasi kemiskinan di sekitarnya. Karena intruksi pembentukan TPK juga datang dari pemerintah sudah seharusnya pemerintah ikut bertanggungjawab dan mengevaluasi kinerja TPK yang ada di Indonesia.
4. Banyaknya anggota masyarakat yang memasuki dunia kerja informal juga berarti belum memadainya serapan kerja dibidang industri mandiri yang seharusnya menawarkan kesejahteraan yang lebih baik.

5. Untuk memaksimalkan kinerja Tim Penanggulangan Kemiskinan akan lebih baik jika lembaga ini dikelola secara profesional, dimana keanggotaan diisi oleh orang-orang yang mumpuni seperti tokoh masyarakat, pengusaha dan orang-orang yang bekerja di dunia sosial.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aziz Stamboel, Kemal, *Panggilan Keberpihakan Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2013
- Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Haughton, Jhonatan dan Shahidur R. Khandker, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2012
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kalitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Khomsan Ali dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Nasikun, *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001
- Qaradhwawi, Yusuf, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1996
- Quinn Patton, Michael, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Slamet Y, *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta: UNS Press, 2006
- Sulistyo, Budi (ed), *MDGs Sebentar Lagi Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia?*, Jakarta: Kompas, 2010
- Sumodiningrat, Gunawan, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009
- Suyanto, Bagong, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, Malang: In-Trans Publishing, 2013

JURNAL

- Jullinar An-naf, "Pengentasan Kemiskinan Sebagai Sasaran Strategis dalam Pembangunan Di Indonesia", *Jurnal Madani*, Edisi I, Mei, 2011
- Yani Riyani dkk, "*Analisis Pengaruh Program Pengentasan Kemiskinan dalam Upaya Menghasilkan Suatu Model Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan (Studi Eksperimen pada Dusun Wonodadi, Desa Sei.*

Bulan Kabupaten Bulu Raya Provinsi Kalimantan Barat”, Jurnal Aplikasi Manajemen, vol. 8: 2 (Mei, 2010)

INTERNET

Nggraini Amelia, Indonesia dan SDGs,
<http://mediaindonesia.com/read/detail/124290-indonesia-dan-sdgs>

Ani Sucianingsih Asry, Kucuran Dana Desa Membantu Mengurangi Angka Kemiskinan, Kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/kucuran-dana-desa-membantu-mengurangi-angka-kemiskinan>.

Edzan Raharjo, Tingkat Kesenjangan Ekonomi di DIY Lebih Tinggi dari Nasional, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3797700/tingkat-kesenjangan-ekonomi-di-diy-lebih-tinggi-dari-nasional>

Harian Merapi, Turun Kurang dari 1 Persen TPK Award inspirasi penanggulangan kemiskinan,
<https://www.harianmerapi.com/news/2017/12/19/3822/turun-kurang-dari-1-persen-tpk-award-inspirasi-penanggulangan-kemiskinan>

Herdiana Ayu, Perundang-undangan Sosial : Pengentasan Kemiskinan dan Prakteknya, Bingkai Kebersamaan,
<https://anfieldvillage.wordpress.com/2015/05/31/perundang-undangan-sosial-pengentasan-kemiskinan-dan-prakteknya/>

<https://bappeda1.slemankab.go.id/evaluasi-kelembagaan-tpk-tim-penanggulangan-kemiskinan-di-kabupaten-sleman.slm>

<https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2017/07/17/500/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta-maret-2017.html>

Mirsel Robert, “Beralih dari MDGs ke SDGs”, Sentilan,
<https://aventsaur.wordpress.com/2015/09/15/beralih-dari-mdgs-ke-sdgs/>

Solider, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,
<https://www.solider.id/2013/07/26/undang-undang-nomor-11-tahun-2009-tentang-kesejahteraan-sosial>, diakses pada 26 Januari 2019

Zahra Camelia, Program Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran, Jokbagin.com
<http://www.jokbagin.com/2012/08/program-pemerintah-dalam-mengatasi.html>

SURAT KABAR

“Kemiskinan Masih Pelik”, *Kompas*, 9 April 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan

TERBITAN TERBATAS

Farida, Luluk, *Upaya Pemberdayaan Ekonomi yang Dilakukan Oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) di Desa Mutigading, Kec. Sanden, Kab. Bantul, Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta : Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Nafiudin, Muhammad, *“Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang”*, Skripsi, Yogyakarta, Program Studi Penegembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Yulianto, Trimio, *Fenomena Program-program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat)*, Tesis, Semarang: Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, 2005

Suci Arrianti, Rachma, *Penanggulangan Kemiskinan di Dusun Ceme, Srigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2012

Surat Keputusan Bupati Sleman Tahun 2015-2018 tentang Keluarga Miskin Desa Tamanmartani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Ujang Kesra Desa Tamanmartani



Wawancara dengan Maemunah Ketua TPK Tamanmartani



Wawancara dengan Riyanto Ketua TPK Ringinsari



Wawancara dengan Penerima Manfaat JSLU



Wawancara Manager Restoran Grafika selaku Mitra TPK Tamanmartani



Wawancara ke SP BU Kalasan selaku Mitra TPK Tamanmartani



Suasana kantor TPK Tamanmartani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Dyah Retno Utami

Tempat/Tgl. Lahir : Ngawi, 22 Mei 1995

Alamat : Dsn. Wonokerto RT/RW:07/01, Ds. Wonokerto,
Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi, Jawa Timur, Kode
Pos 63254

Fak/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Pengembangan
Masyarakat Islam

No.HP : 08970077247

Email : dyahretno778@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. MI Miftahul Huda Wonokerto, 2007
- b. MTs Negeri Kedunggalar, 2010
- c. SMK PSM 1 Kedunggalar, 2013

C. Pengalaman Organisasi

1. Redaktur LPM Rhetor (2017-2018)
2. Divisi Pengembangan Masyarakat KORDISKA (2015-2016)
3. Anggota Sekolah Tani Muda Universitas Gajah Mada (2016)
4. Relawan Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia
(2017-2018)